

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

IRA DITA ANGELINA

2017310583

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ira Dita Angelina
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Mei 1999
N.I.M. : 2017310583
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 17 Maret 2021

(Laely Aghe Africa, SE., MM.)

NIDN. 0709078301

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal: 17 Maret 2021

(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si, CA., CIBA., CMA.)

FACTORS THAT AFFECT THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE SURABAYA CITY GOVERNMENT

Ira Dita Angelina

STIE Perbanas Surabaya

Email: iraditaa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of internal control, quality of human resources, political factors, and the role of information technology on the quality of financial reports of the Surabaya City Government. This research is a type of quantitative research. Collecting data through distributing questionnaires to 25 districts and 16 offices in the city of Surabaya. The questionnaire was distributed to 200 employees of the accounting or finance department. The data that has been collected is processed using SPSS 24. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results obtained indicate that internal control, quality of human resources, political factors, and the role of information technology have a positive effect on the quality of the financial reports of the Surabaya City Government.

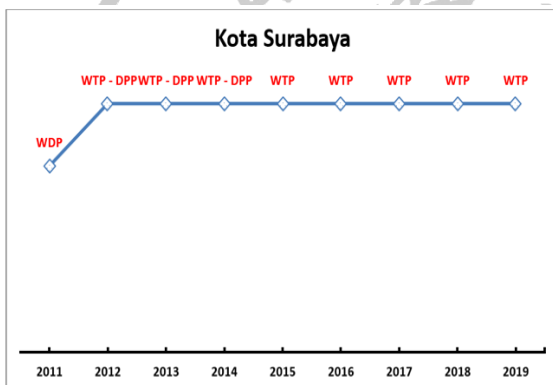
Keywords: *Financial Statement Quality, Internal Control, Human Resources Quality, Political Factor, Information Technology's Role*

PENDAHULUAN

Kegiatan keuangan maupun akuntansi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan ini masih memiliki hubungan dengan kejadian sosial, dimana kejadian sosial memiliki pengaruh dalam perkembangan serta perubahan sistem akuntansi di suatu negara. Perkembangan sistem pemerintah, didukung juga oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi menyeluruh mengenai aturan dan standar yang harus ditetapkan. Dengan adanya otonomi daerah, itu berarti pemerintah daerah merupakan pelaku utama dalam pengelolaan keuangan (Setyowati et al., 2016). Dalam pengelolaan keuangan ini, pemerintah daerah diharuskan untuk menjaga sikap transparan, dan objektif

guna terciptanya keefektivitasan kinerja pemerintah. Untuk mewujudkannya, dapat dilakukan berbagai cara salah satunya dengan membuat laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 dan Pasal 32 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa para pemimpin daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah yang telah diaudit kepada DPRD dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Komponen-komponen yang ada dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Badan yang bertanggungjawab dalam melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh BPK. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terbaik se-Jawa Timur. Selain itu, berhasilnya Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan serta mempertahankan opini yang diperoleh. Data opini yang dikeluarkan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya sebagai berikut:



Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/>

Gambar 1
DIAGRAM OPINI BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
2011-2019

Kriteria kualitas laporan keuangan, selain dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah diatur di dalam bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan itu dapat membantu dalam kegiatan evaluasi, serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi penggunaannya. Dikatakan andal apabila bebas dari kesalahan yang material,

serta menyajikan setiap informasinya secara tepat dan objektif. Selanjutnya, yaitu laporan keuangan haruslah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan haruslah mudah untuk dipahami oleh penggunaanya.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan merupakan teori motivasi yang menekankan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa sasaran yang spesifik dan sulit menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa sasaran (Robins, 2014)

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan bisa didefinisikan sebagai catatan akuntansi suatu entitas dengan jangka waktu tertentu yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut (Mulyadi, 2016). Oleh karena itu, laporan keuangan haruslah dibuat dengan kualitas yang baik. Untuk menentukan kualitas suatu laporan keuangan, maka dapatlah dilihat dari informasi-informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang harus relevan, reliabel, bisa dibandingkan, dan bisa dipahami.

Pengendalian Internal

Mendorong kepatuhan dan efisiensi dari kebijakan manajemen, mengecek keandalan dan ketelitian tentang informasi akuntansi, menjaga kekayaan organisasi dengan melakukan koordinasi tentang metode dan ukuran, serta menetapkan struktur organisasi merupakan bagian dari Pengendalian Internal (Mulyadi, 2016). Untuk sektor pemerintahan di Indonesia, menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditujukan untuk mencapai efektivitas serta efisiensi dari kinerja Aparatur Negara.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk melaksanakan kewenangan dan fungsi guna mencapai tujuan disebut dengan kinerja sumber daya manusia (Ni Made Sudiarianti et al., 2015). Sumber daya manusia adalah sumber daya paling penting milik pemerintah. Sumber daya manusia ini haruslah memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan fungsi-fungsi serta kewenangannya di lingkungan pemerintahan.

Faktor Politik

Faktor penting lainnya adalah faktor politik. Faktor ini memiliki andil yang besar karena fakta bahwa karakteristik khas sektor publik di Indonesia, terutama pemerintah, sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Faktor-faktor politik dapat berupa intervensi politik di bidang keuangan dan ketidaksinergian antara lembaga politik dan proses politik dengan domain administrasi pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018). Oleh karena itu, Kepala Daerah beserta stafnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus saling melengkapi, berkoordinasi, menyinkronkan, dan bermitra satu sama lain dalam proses penyusunan laporan keuangan

Peran Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat membantu suatu entitas atau organisasi dalam mengelola data-data yang dimilikinya. Jika dikaitkan dengan sektor pemerintahan, maka teknologi informasi ini dapat menunjang kinerja pemerintah dalam proses pengelolaan data atau informasi internal didalam pemerintah (Mulyadi, 2016). Teknologi informasi ini juga dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern ditujukan untuk mencapai efektivitas serta efisiensi dari kinerja Aparatur Negara. Berdasarkan teori penetapan tujuan, pengendalian internal dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu membuat laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Sistem pengendalian internal ini dibagi menjadi 5 (lima) aspek yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Jika kelima aspek tersebut dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Dengan kata lain, semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh penelitian Agung & Gayatri (2018); Amelia & Hendri (2019) yang menyatakan pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H1: Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber daya manusia yang baik haruslah memiliki keterampilan, sikap dan pengetahuan yang baik pula. Jika ketiga aspek tersebut terpenuhi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Berdasarkan teori penetapan tujuan, sumber daya manusia dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan bidangnya akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018); Amelia & Hendri (2019); dan Setyowati et al. (2016) menyatakan

bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kepala Daerah beserta stafnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus saling melengkapi, berkoordinasi, menyinkronkan, dan bermitra satu sama lain dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka tidak mustahil untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik pula. Berdasarkan teori penetapan tujuan, pengelolaan faktor politik dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan. Dengan menerapkan hubungan bermitra satu sama lain secara positif serta melakukan koordinasi secara terperinci dan menyeluruh, maka akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018) menyatakan bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

H3: Faktor Politik Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

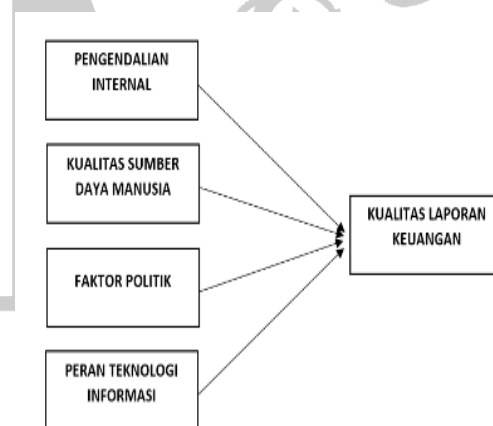
Pengaruh Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam pemrosesan data pengelolaan data serta penyajian data keuangan pemerintah. Berdasarkan teori penetapan tujuan, teknologi informasi dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dapat meminimalisir

kesalahan dan akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Dengan kata lain, semakin baik penerapan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dapat dihasilkan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Angriawan & Yudianto (2018); Efendi et al. (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H4: Peran Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Berdasarkan beberapa kajian teoritis serta pokok permasalahan yang telah ada, kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya. Sampel penelitiannya yaitu staf bagian akuntansi yang ada di dalam OPD di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya dengan masing-masing OPD 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan

metode *purposive sampling*, dengan prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dimana pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan atau menghimpun data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden (Sugiyono, 2014). Kuesioner disebar ke beberapa Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya.

Variabel Penelitian

Variabel independen yang digunakan yaitu pengendalian internal (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), faktor politik (X3), dan peran teknologi informasi (X4) dengan kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kualitas Laporan Keuangan

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Penggunaan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, dapat membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Kualitas laporan keuangan diukur dengan 4 (empat) indikator, diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan modifikasi skala likert dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana (1) yaitu “sangat tidak setuju”, dan (4) yaitu “sangat setuju”.

Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah ini bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada, seperti aset dan tenaga kerja yang ada didalam lingkup pemerintahan. Sistem pengendalian internal ini diukur dengan 5 (lima) indikator diantaranya yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Penelitian ini menggunakan modifikasi skala likert dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana (1) yaitu “sangat tidak setuju”, dan (4) yaitu “sangat setuju”.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat menjadi penunjang pemerintah untuk melangkah ke depan dengan lebih baik atau bahkan bisa menjadi faktor terbesar dalam kehancuran pemerintah. Sehingga, diperlukan pengawasan khusus untuk mengawasi sumber daya manusia agar dapat mengelola aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah dengan baik dan bertanggung jawab. Sumber daya manusia diukur dengan 3 (tiga) indikator diantaranya keterampilan, sikap dan pengetahuan. Penelitian ini menggunakan modifikasi skala likert dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana (1) yaitu “sangat tidak setuju”, dan (4) yaitu “sangat setuju”.

Faktor Politik

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah faktor politik. Faktor ini memiliki pengaruh besar karena fakta bahwa karakteristik khas sektor publik di Indonesia, terutama pemerintah, sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Faktor politik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu ketergantungan pada pusat, dan ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan modifikasi skala likert dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana (1) yaitu “sangat tidak setuju”, dan (4) yaitu “sangat setuju”.

Peran Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat membantu suatu entitas atau organisasi dalam mengelola data-data serta informasi yang dimilikinya, guna mencapai efektivitas serta efisiensi dari kinerja suatu entitas atau organisasi. Teknologi informasi diukur dengan 3 (tiga) indikator

diantaranya yaitu aplikasi dan software yang digunakan, sistem akuntansi, dan jaringan internet. Penelitian ini menggunakan modifikasi skala likert dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana (1) yaitu “sangat tidak setuju”, dan (4) yaitu “sangat setuju”.

- X₂ = Kualitas sumber daya manusia
- X₃ = Faktor politik
- X₄ = Peran teknologi informasi

Teknik Analisis Data

Analisis ini digunakan untuk menilai pengaruh pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, faktor politik dan peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

- Y = Kualitas laporan keuangan
- a = Konstanta
- b = Koefisien
- X₁ = Pengendalian Internal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik t – Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} digunakan untuk pengambilan keputusan. Apabila nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05%. Jika $sig. t_{hitung} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 4.22
HASIL UJI t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,369	1,880		1,793	,075
Pengendalian Internal	,213	,055	,246	3,840	,000
Kualitas SDM	,302	,091	,229	3,302	,001
Faktor Politik	,335	,130	,183	2,581	,011
Peran TI	,292	,091	,224	3,195	,002

Sumber: Hasil olah data, 2020

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk mencapai efektivitas serta efisiensi dari kinerja

Aparatur Negara. Pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya operasional dari suatu organisasi atau entitas. Dengan adanya pengendalian yang ditetapkan, segala proses didalam organisasi akan terstruktur dan terkoodinir dengan baik. Diketahui pada uji regresi linier berganda bahwa nilai B₁ yaitu 0,213

yang berarti terdapat hubungan yang positif antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil olah data dengan uji hipotesis juga menunjukkan hal serupa. Pada uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan *Level of Significant* sebesar 5% dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,840 > 1,973$ maka, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengendalian internal yang dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Pengendalian internal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2010. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengendalian internal diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Jika kelima aspek tersebut dijalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik. Jika pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018) dan Amelia & Hendri (2019) yang menyatakan pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya paling penting yang dimiliki oleh pemerintah. Sumber daya manusia ini haruslah memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan fungsi-fungsi serta kewenangannya di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, pengawasan akan sumber daya manusia haruslah dilakukan dengan terstruktur dan terus-menerus.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai B_2 yaitu 0,302 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil olah data dengan uji hipotesis juga menunjukkan hal serupa. Pada uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan *Level of Significant* sebesar 5% dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,302 > 1,973$ maka, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem terbaru dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Mereka menetapkan sistem E-SDM yang merupakan database berisikan seluruh data pegawai, seperti jabatan dan riwayat kepangkatan sejak masuk hingga masa pensiun. Sistem ini diharapkan dapat memantau kinerja dari sumber daya manusia yang mereka miliki serta membantu meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tambahan. Karena, sumber daya manusia yang cukup, memadai dan memiliki pengetahuan serta memiliki integritas tinggi akan sangat mempengaruhi laporan keuangan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018); Amelia & Hendri (2019); dan Setyowati et al. (2016) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Faktor penting selanjutnya yaitu faktor politik. Faktor ini memiliki pengaruh besar karena fakta bahwa karakteristik khas sektor publik di Indonesia, terutama pemerintah, sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai B_3 yaitu 0,335 yang berarti terdapat hubungan yang

positif antara faktor politik terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil olah data dengan uji hipotesis juga menunjukkan hal serupa. Pada uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan *Level of Significant* sebesar 5% dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,581 > 1,973$ maka, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara faktor politik terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan hubungan bermitra satu sama lain secara positif serta melakukan koordinasi secara terperinci dan menyeluruh, akan mempengaruhi laporan keuangan. Maka, dengan diterapkannya koordinasi secara terperinci serta kerjasama yang baik antar kepala daerah dengan staffnya di tiap tingkatan daerah akan membantu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018) menyatakan bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Peran Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat membantu pemerintah dalam mengelola data-data serta informasi yang dimilikinya, guna mencapai efektivitas serta efisiensi dari kinerja suatu entitas atau organisasi. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai B_4 yaitu 0,292 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil olah data dengan uji hipotesis juga menunjukkan hal serupa. Pada uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 dengan *Level of Significant* sebesar 5% dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,195 > 1,973$ maka, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya juga menjadi pelopor dalam penerapan teknologi informasi dalam segala urusan internal maupun eksternal seperti dalam pelayanannya. Sebagai contoh sistem “E-SDM” untuk memantau kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara). “E-Health” sebagai sistem dalam bidang kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk mendaftar secara online tanpa mengantri di puskesmas atau rumah sakit umum daerah di Surabaya. Teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dapat meminimalisir kesalahan dan akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Dengan kata lain, semakin baik penerapan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dapat dihasilkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan & Yudianto (2018); Efendi et al. (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, faktor politik dan peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Sampel penelitian merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan total 185 responden di 41 OPD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, akan semakin baik pula

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berintegritas, memiliki pengetahuan dan memadai akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.
3. Faktor politik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang menyeluruh antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
4. Peran teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi informasi yang cukup dan memadai dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti tidak dapat bertemu dengan responden secara langsung dan hanya menitipkan kuesioner dikarenakan kesibukan dari responden serta kondisi pandemi covid-19. Serta adanya beberapa kuesioner yang tidak kembali kepada peneliti dikarenakan beberapa hal, sehingga terjadi pengurangan terhadap jumlah responden.
2. Peneliti hanya menggunakan sampel 25 kecamatan dari total 31 kecamatan di Kota Surabaya dan 16 dinas dari total 21 dinas di Kota Surabaya.
3. Dalam proses pengambilan data, terkadang jawaban yang diberikan responden tidak menunjukkan keadaan

responden sesungguhnya. Hal itu dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pemikiran serta faktor kejujuran antar tiap responden.

4. Responden tidak bersedia untuk melakukan wawancara walaupun secara daring.

Saran

Kesimpulan dari hasil penelitian masih memiliki beberapa keterbatasan serta kekurangan. Oleh karena itu, peneliti memberi beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk selalu melakukan *follow up* kepada responden, guna mengurangi resiko kuesioner tidak kembali serta menjaga ketepatan waktu pengembalian kuesioner.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian yang termasuk OPD di beberapa kota atau kabupaten.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen diluar variabel yang telah digunakan. Variabel tersebut seperti peran auditor internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan wawancara dengan responden secara langsung maupun dengan media lain guna mendapat keakuratan dan kelengkapan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 23,

1253.
<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17>
- Amelia, S., & Hendri. (2019). The Influence of Human Resources , and Internal Control on the Quality of Financial Statement: Accounting Information System as a Moderating Role. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 6(10), 761–769.
- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. (2018). Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement of West Bandung District, West Java Province, Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i1.15652>
- Efendi, L., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 182–195. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8230>
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. In *Sistem Akuntansi*.
- Ni Made Sudiarianti, I Gusti Ketut Agung Ulupui, & I G.A. Budiasih. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian Mandiri*.
<https://jatim.bpk.go.id/>
- Nirwana, N., & Haliah, H. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28–40.
- <https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0014>
- Peraturan Pemerintah. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. *Revista Brasileira de Medicina Do Esporte*.
- Peraturan Pemerintah. (2010). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Pp.
- Robins, stephen. p. (2014). Teori Budaya Organisasi. In *Perilaku Organisasi*.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG. *KINERJA*. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *METODE PENELITIAN ILMIAH*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. In *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*.